

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kenyataan Indonesia sebagai masyarakat yang multikultural merupakan kebanggaan sekaligus kecemasan. Fakta menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat lebih kurang 665 bahasa daerah, dan 300 suku bangsa yang tersebar pada 17.670 pulau besar dan kecil (www.infoplease.com/2004). Di satu sisi, fakta ini membuat kebanggaan tersendiri karena semua keragaman itu bersatu dalam kesatuan wilayah negara Indonesia yang telah dikukuhkan sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, sehingga menjadi kekayaan kultural dan sosial bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi di sisi lain, fakta ini sesungguhnya mengandung potensi konflik yang dapat memecah belah negara kesatuan Indonesia.

Selama ini dalam pendidikan, khususnya PIPS, fenomena keragaman budaya dan etnik dilihat hanya sebagai kebanggaan. Keragaman dibicarakan sebatas potensi kekayaan bangsa yang patut dikembangkan, namun tidak dibahas lebih dalam bagaimana mewujudkan potensi itu menjadi kekayaan yang aktual, dan bagaimana mencegah akibat negatif yang ditimbulkan keragaman tersebut.

Kenyataan di tengah masyarakat dewasa ini menunjukkan arus balik ketika keragaman budaya, agama, dan sukubangsa menjadi pemicu terjadinya pertikaian internal dalam masyarakat Indonesia. Sejak reformasi banyak konflik yang muncul ke permukaan baik bermuansa politik, atau bermuansa etnik, agama,

maupun hanya sekedar perwujudan rasa ketidak puasan. Dalam laporan situs FISIP UNMUL (2003), diidentifikasi bahwa konflik ada yang bersifat sporadis misalnya kerusuhan antar warga, dan ada yang bersifat laten atau berkepanjangan seperti konflik Aceh, konflik Ambon, Poso, bahkan yang terakhir konflik di Papua. Walau demikian sulit membedakan secara jelas sifat kedua konflik itu dalam tataran praktis.

1.1.1 Keragaman Etnik dan Potensi Konflik dalam Masyarakat

Indonesia

Karena keragaman etnik yang dimiliki, negara Indonesia dapat disebut sebagai negara bangsa yang unik. Sebagaimana diungkap oleh Hardiman, dalam kata pengantarnya pada buku Will Kymlicka, edisi terjemahan (2002), bahwa keunikan itu terlihat dalam kenyataan di mana selain multi etnik, bangsa Indonesia juga terdiri dari multimental (agama). Karena itu dapat disebut "Indonesia adalah sejumlah bangsa" dengan ukuran, makna, dan karakter yang berbeda-beda. Secara historis, ideologi keragaman itu dipertautkan menjadi sebuah struktur ekonomis dan politis bersama. Sejarah terbentuknya NKRI tahun 1945 membuktikan bagaimana keragaman suku, agama, dan keturunan dipersatukan dalam satu cita-cita bernegara Republik Indonesia (Risalah Sidang BPUPKI/PPKI 1945 oleh Setneg RI, 1995).

Menurut Kymlicka (2002: 14-18) ada dua pola besar keragaman budaya. Bentuk pertama disebutnya dengan **multibangsa**, yakni bergabungnya budaya-budaya yang berkuasa sebelumnya dan terkonsentrasi secara teritorial, ke dalam negara yang lebih besar. Kebudayaan yang bergabung itu disebut

sebagai "minoritas bangsa" yang ingin mempertahankan diri sebagai masyarakat tersendiri di sisi kebudayaan mayoritas dan menuntut berbagai bentuk otonomi untuk memastikan keberlangsungannya sebagai masyarakat tersendiri.

Bentuk kedua disebutnya dengan **polietnik** yang terbentuk karena keragaman budaya yang dibawa oleh gelombang imigrasi baik perorangan atau kelompok. Para imigran membentuk komunitas dalam negara yang didatangi sebagai kelompok etnik. Kelompok ini bergabung ke dalam masyarakat yang lebih besar dan diterima sebagai anggota penuh masyarakat. Perjuangan mereka adalah mencari pengakuan yang lebih besar atas identitas etnik mereka.

Bangsa Indonesia memiliki kedua bentuk keragaman budaya berupa multibangsa dan sekaligus polietnik. Pola yang pertama (multibangsa) terlihat dengan banyaknya sukubangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia memiliki karakteristik sendiri dan merupakan bagian dari negara bangsa Indonesia. Pola kedua (polietnik) ditemukan dengan kehadiran bangsa pendatang seperti India, Arab, Cina dan lain-lainnya sehingga membentuk kelompok etnik tersendiri dalam masyarakat. Di beberapa tempat di wilayah perkotaan ditemukan adanya pemukiman yang merujuk kepada etnik tertentu seperti kampung Cina, kampung Arab, kampung India dan sejenisnya. Selain itu juga ditemukan misalnya pada satu wilayah yang dihuni satu kelompok mayoritas, di dalamnya terdapat kelompok etnik tertentu yang membentuk komunitas sendiri, misalnya di Medan yang dominan etnik Melayu dan Batak, tapi ada etnik Jawa yang memiliki komunitas sendiri.

Dalam pandangan geografi budaya, sesungguhnya kekayaan etnik di Indonesia dapat menjadi potensi yang menguntungkan dalam kemajuan hidup bangsa, jika antar etnik hidup dalam kondisi saling menghormati di bawah payung negara bangsa Indonesia. Di Amerika Serikat (Getis & Getis, 1985: 150) misalnya, keragaman budaya menjadikan geografi budaya Amerika sedemikian kaya dan menakjubkan yang mencakup suatu jalinan dari suku bangsa yang berbeda, asal usul ras, kesenian, dan etnik. Setiap etnik dapat merayakan dan mengembangkan identitas etniknya. Keragaman ini dipahami dengan baik oleh warganegara.

Lain halnya di Indonesia, fenomena keanekaragaman budaya seakan tenggelam dalam kesatuan budaya bangsa sebagai bagian dari upaya "*national and character building*" seperti yang sering disebut-sebut pada masa pemerintahan Orde Lama sampai Orde Baru. Keanekaragaman budaya yang tumbuh dari kebudayaan daerah, justru mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dalam dasar kebudayaan nasional yang semakin rasional, fungsional, dan berwawasan universal (Sarasehan dalam rangka HUT XXV Kompas, 1990 "Menuju Masyarakat Baru Indonesia"), tetapi juga sering bemuansa politis, sentralistis, dan kecungaan terhadap kebudayaan daerah. Di samping itu, selama ini dalam pemerintahan RI belum pernah ditetapkan politik kebudayaan yang lengkap, jelas, dan tegas serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Jika ada pada waktu itu keanekaragaman yang muncul ke permukaan, hanyalah sebagai simbol kekuasaan dan sebagai upaya mempertahankan kontrol atas suatu masyarakat yang sangat beragam dan berbeda (Bloomfield cs, 2000: 34). Konsekwensi

semua itu adalah kaburnya makna keanekaragaman budaya dan juga keanekaragaman etnik, karena dilebur dalam sistem yang mengutamakan penyeragaman sebagai kontrol dan aturan perilaku masyarakat Indonesia yang beragam. Potensi positif yang ada dalam setiap etnik seyogyanya menjadi kekayaan semua bangsa. Akan tetapi karena selama ini ditekan ke bawah permukaan, maka pada saat tekanan difepaskan justru berbalik menjadi sentimen etnik yang setiap saat dapat memicu konflik dengan etnik lain.

Berdasarkan data yang dikumpulkan INCIS (www/incis.or.id/2000) dalam kurun waktu 4 tahun atau sejak penghujung kekuasaan Orde Baru telah terjadi berbagai kerusuhan massa, antara lain di Situbondo (Oktober 1996), Tasikmalaya (Desember 1996), Rengasdengklok (Januari 1997), Banyuwangi (September, 1998), Ketapang (November, 1998), Kupang (Desember, 1998), Ambon dan Sambas (1999). Berbagai kerusuhan itu dapat dikelompokkan dalam tiga bentuk, yakni: a) peristiwa ketegangan antar etnik, b) peristiwa berlatar belakang agama, dan c) peristiwa antar kelompok masyarakat.

Di luar data yang ditemukan oleh INCIS, masih ada kerusuhan-kerusuhan lain yang terjadi, seperti di Aceh, Papua, Poso, dan Batam, bahkan terjadi kerusuhan anti Cina di berbagai kota (Kristof 1998; Landler, 1998). Semuanya terjadi dalam kurun waktu yang hampir bersamaan. Seolah potensi konflik di Indonesia meledak dan menyebar dengan serentak.

Jika ditambahkan sebagai kategori keempat, peristiwa Aceh dan Papua merupakan hubungan antara warga dengan negara (pemerintah). Menurut Hardiman dalam pengantarnya pada edisi terjemahan buku Will Kymlicka (2002), kerusuhan di Indonesia sejak kejatuhan Orde Baru dapat disebut sebagai

gerakan sosial, baik bersifat horizontal maupun vertikal. Kerusuhan antar etnik, antar kelompok agama dan sejenisnya digolongkan sebagai gerakan horizontal. Gerakan ini dilakukan oleh kelompok-kelompok etnik. Tetapi kerusuhan seperti Aceh dan Papua dikategorikan sebagai gerakan vertikal, yang dilakukan oleh minoritas bangsa.

Di satu sisi disadari bahwa keragaman etnik dalam negara bangsa Indonesia menghendaki perhatian yang lebih serius melalui dunia pendidikan. Terjadinya berbagai kerusuhan massa dan konflik akhir-akhir ini, merupakan bukti dari rasa nasionalisme bangsa Indonesia mengalami kemunduran, dan rasa partikularisme lokal - di propinsi tertentu - cenderung meningkat (Azra, 2003a: 74). Di pihak lain struktur yang ada tidak mampu menyelesaikan konflik dalam waktu yang singkat. Keadaan ini diperparah dengan semakin membudayanya kekerasan dalam masyarakat Indonesia disebabkan faktor media yang semakin mengglobal, dan juga akumulasi kebencian dalam masyarakat (Suseno, 2003:122). Oleh karena itu, peran pendidikan sangat diperlukan sebagai upaya pencegahan konflik agar situasi tidak semakin memburuk.

1.1.2 Pendidikan Multikultural dalam PIPS

Pendidikan multikultural yang mulai berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1960an merupakan kebangkitan gerakan hak-hak sipil sebagai koreksi terhadap kebijakan asimilasi dengan kelompok budaya yang dominan. Atas dasar itu pendidikan multikultural dipahami antara lain sebagai pendidikan yang mencerminkan keragaman siswa dan masyarakat (Burnett, 1998); pendidikan yang mengaktualisasikan kemajemukan (England, 1992); pendidikan yang

menggunakan pendekatan belajar mengajar yang berlandaskan filosofi dan nilai-nilai demokratis untuk mendorong terciptanya kemajemukan budaya dalam masyarakat yang beragam secara kultural dan dalam dunia yang interdependen (Bennet, 1995: 13); dan pendidikan yang mengembangkan filosofi kesetaraan dalam kesempatan dan keberhasilan pendidikan (*equal education and equity of outcomes*) (Nieto, 1992: 2).

Di Indonesia, sejauh ini belum terlihat secara nyata kurikulum pendidikan multikultural yang dikembangkan secara sistematis seperti di negara maju. Sementara di sisi lain, persoalan antar kelompok – terutama yang disebabkan keragaman budaya - yang terjadi akhir-akhir ini menuntut perhatian dan respon nyata dari kalangan pendidikan agar konflik tidak meluas dan menjadi permusuhan yang mendalam.

Meskipun saat ini, di sekolah ada Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang mencakup berbagai bidang-bidang studi seperti Sejarah, Ekonomi, Geografi, dan bahkan Pendidikan Kewargaan Negara, Sosiologi/Antropologi (NCSS, 1994: 157; Somantri 2001: 85), tidak ada yang bersentuhan langsung dengan pendidikan multikultural. Memang dalam mata pelajaran sosiologi untuk kelas 2, berdasarkan kurikulum 2004, ada satu topik yang membahas tentang kehidupan masyarakat multikultural. Namun ruang lingkupnya sangat terbatas pada satu kompetensi dasar yaitu mengembangkan sikap dalam masyarakat multikultural sebagaimana dimuat dalam buku teks Sosiologi untuk SMA Kelas 2 yang ditulis oleh Janu Murdiyatomoko dengan Penerbit Grafindo.

Sejalan dengan perkembangan keragaman dalam masyarakat, pendidikan multikultural mendapat perhatian besar di berbagai negara yang



berdiri dari beragam suku bangsa. Akan tetapi antara satu negara dengan negara lain memiliki kekhasan tersendiri, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakatnya.

Sebagai contoh dapat dilihat perkembangan multikulturalisme dan pendidikan multikultural yang berbeda di Amerika, Inggris dan Kanada. Di Amerika pendidikan multikultural identik dengan gerakan multikulturalisme, yang dimulai pada 1950an berupa gerakan *civil rights* atau hak-hak sipil (Parekh, 1997: 170). Persoalan utamanya berawal dari tuntutan asimilasi terhadap komunitas kulit hitam, dan sebagai konsekwensinya komunitas kulit hitam meminta hak politik dan ekonomi yang sama dengan warga kulit putih. Kemudian gerakan ini berkembang menjadi gerakan budaya dan tuntutan di bidang pendidikan yang juga didukung oleh kaum imigran yang berasal dari etnik lain seperti Asia dan Amerika Latin. Satu dari bentuk gerakan ini adalah tuntutan perlunya pendidikan multikultural di sekolah dan perguruan tinggi. Dapat disimpulkan bahwa kehadiran pendidikan multikultural di AS pada awalnya dilatarbelakangi oleh tuntutan untuk menghapuskan masalah diskriminasi rasial (Banks, 1997: 96) sekaligus merupakan sebuah gerakan dalam perkembangan masyarakat multikultural Amerika (Bennet, 1995: 13). Bahkan ditegaskan bahwa pendidikan multikultural harus dimasukkan ke dalam PIPS (*Social Studies*) dengan dua alasan: 1) untuk mengungkapkan kebenaran sejarah Amerika, dan 2) sebagai komitmen terhadap masyarakat demokratis (Banks 1991: 459).

Lain halnya dengan Inggris (Parekh, 1997: 175), gerakan multikultural ditandai dengan kedatangan imigran Karibia dan Asia. Dikarenakan keharusan

asimiliasi dengan budaya Inggris, bahasa dan budaya mereka tidak boleh digunakan, dan bahkan anak-anak imigran diperbolehkan bersekolah hanya di tempat yang sedikit kalangan pendatangnya. Bagaimanapun asimiliasi dilakukan, warga yang berbeda tetap saja tidak dapat membaaur secara utuh sehingga kaum imigran tetap terisolasi. Akibatnya banyak anak-anak imigran yang rendah prestasi belajarnya. Akhirnya pemerintah Inggris menyadari bahwa perbedaan etnik dan budaya tidak dapat dihilangkan.

Pandangan masyarakat Inggris terhadap isu multikultural berubah drastis sejak era 1950an dengan meningkatnya jumlah imigran dari negara-negara Persemakmuran yang memasuki pasar kerja dalam ekonomi Inggris (Watson, 2000: 92). Para imigran membentuk komunitas-komunitas tersendiri terutama di kota-kota besar. Seiring dengan perubahan demografis tuntutan kebebasan budaya terus berkembang dengan munculnya tuntutan kesetaraan yang disuarakan tidak hanya oleh etnik yang berbeda tetapi juga kelas sosial dan penganut agama tertentu serta kelompok gay dan lesbian. Gerakan ini berada pada dua tataran yaitu pertama, menuntut kesamaan perlakuan dalam ruang publik sebagai upaya memerangi diskriminasi yang terlembaga; kedua, lebih radikal lagi menuntut pemenuhan prakondisi yang memungkinkan akses terhadap semua fasilitas sosial dan pendidikan yang ditawarkan dalam masyarakat, serta tuntutan agar pemerintah melakukan intervensi dan tindakan afirmatif untuk mewujudkan prakondisi tersebut. Pada puncak tuntutan adalah perlunya pengakuan oleh negara terhadap perbedaan budaya di tingkat publik, pendidikan, dan bahkan hukum keluarga (*family law*).



sejalan di Amerika Serikat dan Inggris tampak bahwa pendidikan multikultural sebagai sebuah gerakan perjuangan untuk menghapuskan diskriminasi yang terlembaga, bentuk pendidikan multikultural di Inggris berbeda dengan Amerika dalam beberapa hal yakni: pendidikan multikultural untuk semua bukan hanya kelompok minoritas; pendidikan multikultural diajarkan ditingkat sekolah tidak termasuk perguruan tinggi; dalam pendidikan multikultural termasuk juga unsur agama, dan tujuan pendidikan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman antar budaya (Parekh, 1997: 177).

Terakhir, di Kanada lahirnya pendidikan multikultural bersamaan dengan perkembangan kondisi masyarakat Kanada yang memang dari awal sudah terdiri dari berbagai budaya yang berasal dari imigran berbagai negara (Parekh, 1997: 180; Tilaar, 2004: 149). Semula pemerintah menerapkan kebijakan bikultural (kelompok awal dominan Perancis dan Inggris) tetapi kemudian mengembangkan kebijakan multikultural untuk menampung kelompok lainnya, yang dikukuhkan dengan Multiculturalism Act th 1971. Undang-undang ini menegaskan tidak adanya supremasi secara budaya, tetapi adalah hak setiap komunitas budaya untuk mengembangkan identitas komunitas mereka (Gavaki, 1993). Kebijakan ini turut pula mempengaruhi bidang pendidikan.

Demikian pula Australia mengembangkan bentuk pendidikan yang berbeda yang dilatarbelakangi dengan adanya budaya minoritas (suku asli dan pendatang) di satu sisi, dan budaya *mainstream* yang dominan di sisi lain. Disadari bahwa kelompok minoritas aborigin mengalami diskriminasi dan bahkan terkebelakang dalam pendidikan maka kalangan pendidikan mencoba mengembangkan kesadaran multikultural melalui bidang mereka (Partington &

McCudden, 1992). Dalam perkembangannya tuntutan keragaman etnik di Australia tidak hanya antara kelompok mayoritas dengan suku aborigin tetapi juga dengan kelompok imigran lainnya.

Masuknya paham multikulturalisme ke dalam pendidikan di Australia sejalan dengan kondisi politik pemerintahan (Tilaar, 2004:159-161). Sehubungan dengan itu ada tiga fase perkembangan pendidikan multikultural di Australia. Pertama, pendidikan untuk kaum imigran, sebagai konsekuensi dari politik pasif ke arah asimilasi aktif. Dalam periode ini pendidikan untuk kaum imigran bersifat pasif, anak-anak kaum imigran menyesuaikan diri dengan kurikulum yang ada. Kedua, pendidikan multikultural sebagai konsekuensi kemenangan Partai Liberal dalam pemilu 1972. Pada era 1980an hampir semua propinsi mengadopsi pendidikan multikultural. Ketiga, implikasi ekonomi (hubungan perdagangan Australia dan negara-negara Asia) dalam pendidikan multikultural yang ditandai dengan memasukan "Program Kajian Asia", ke dalam pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural di Australia mempunyai kekhasan yang terkait dengan kebijakan-kebijakan migrasi, ekonomi, masalah etnik, dan kaum imigran.

Dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perbedaan pendidikan multikultural di satu tempat dengan tempat lain terkait dengan masalah yang terjadi karena keragaman dalam masyarakatnya, dan perjalanan sejarah gerakan yang muncul untuk mempertahankan keragaman tersebut. Dengan kata lain setiap masyarakat memiliki model-model pendidikan multikultural yang sesuai dengan latar belakang dan tuntutan masyarakatnya.

Di Indonesia sendiri kesadaran bahwa perlu pendidikan multikultural telah lama muncul. Sebagai contoh upaya pengembangan kurikulum berbasis lokal

atau *Local Content Curriculum* (Yeom, Acedo, & Utomo, 2002). Namun dalam konteks ini kesadaran multikultural ditampilkan dengan menghidupkan kebudayaan dari setiap etnik pada masing-masing daerah. Tujuan utama dari pendidikan budaya tersebut adalah menjadikan siswa dekat dengan lingkungan. Sejalan dengan penegasan Rochiati Wiriatmadja (2002: 255) "tujuan pendidikan multikultur adalah untuk mempersiapkan anak didik dengan sejumlah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam lingkungan budaya etnik mereka, budaya nasional, dan antar budaya etnik lainnya".

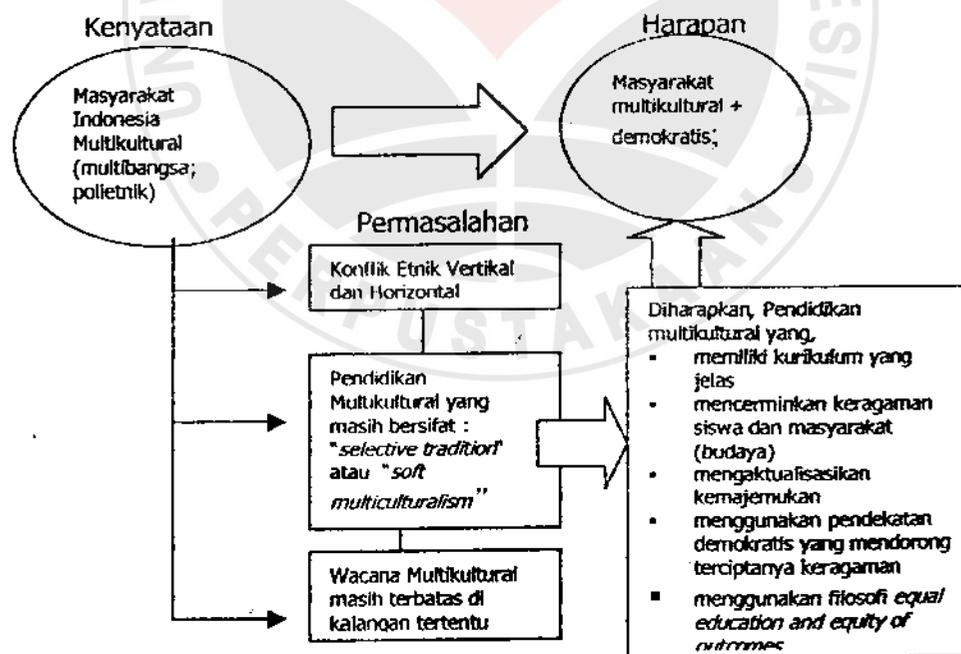
Di samping itu, pendidikan keragaman budaya dalam kurikulum IPS sekarang bersifat selektif, yakni pengembangan pemahaman budaya dalam pengajaran dipilih dari budaya yang ada di sekitar siswa., seperti terlihat dalam buku teks PIPS yang digunakan di sekolah. Menurut Watson (2000: 51-54) pengembangan kesadaran budaya seperti itu tergolong kepada "*soft multiculturalism*" atau kesadaran multikultural yang hanya dipermukaan saja. Akan tetapi pendidikan multikultural yang diinginkan adalah berupa kurikulum pendidikan multikultural yang didasarkan kepada landasan filosofis, psikologis, dan pedagogis yang jelas sebagaimana yang telah dikembangkan di negara-negara maju yang masyarakatnya beragama.

Bagi masyarakat Indonesia, kenyataan sebagai masyarakat multikultural tidak dipungkiri lagi. Begitu juga harapan ke depan mewujudkan masyarakat multikultural yang saling menghormati dan mampu hidup berdampingan secara damai (masyarakat multikultural yang demokratis) merupakan cita-cita semua orang. Akan tetapi jurang antara kenyataan dan harapan masih sangat luas dengan ditemukannya berbagai persoalan seperti: masih berkobarnya konflik

etnik baik horizontal maupun vertikal yang seolah berkepanjangan, belum adanya bentuk kurikulum pendidikan yang secara khusus berbicara tentang hubungan-konflik antar etnik, masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang makna multikultural dalam kehidupan masyarakat, atau konsep multikultural baru sebatas wacana di kalangan akademisi.

Menurut sudut pandang pendidikan, kondisi masyarakat Indonesia yang beragam secara etnik masih merupakan potensi yang perlu dikembangkan melalui program dan kurikulum pendidikan yang khusus dan terarah kepada pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan multikultural di kalangan siswa. Secara diagramatik dapat digambarkan permasalahan yang dihadapi masyarakat multikultural di Indonesia dalam hubungan dengan pendidikan sebagai berikut.

Gambar 1.1 Peta Pemasalahan Keragaman Masyarakat Indonesia dan Kaitannya dengan Pendidikan Multikultural



Merujuk kepada peta permasalahan di atas maka pendidikan multikultural yang perlu dikembangkan di Indonesia minimal memiliki dua misi utama yaitu: 1) sebagai upaya jangka panjang dalam pencegahan konflik etnik di Indonesia, dan 2) mampu mendidik siswa menjadi anggota masyarakat yang punya kesadaran multikultural. Dari kedua misi itu diharapkan pendidikan multikultural Indonesia merupakan salah satu upaya sistematis untuk mencapai masyarakat multikultural Indonesia yang demokratis.

Untuk merumuskan sebuah kerangka hipotetik landasan pendidikan multikultural tersebut perlu suatu landasan rasional, filosofis, psikologis, dan pedagogis yang dikembangkan dari kejelasan pemikiran tentang apa sesungguhnya persoalan etnik di Indonesia. Misalnya, apakah persoalan etnik di Indonesia menyangkut diskriminasi (ras, politik, ekonomi, agama dsb), atau menyangkut stereotip, atau kebijakan, atau pertikaian antar agama, atau gabungan dari semua itu?

Satu di antara kemungkinan-kemungkinan kajian yang dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: *mengkaji peristiwa konflik yang terjadi dalam masyarakat*. Dari kajian ini, diharapkan dapat diketahui faktor-faktor yang melatarbelakangi konflik dan indikator-indikator persoalan etnik yang berkembang.

Sejauh ini media massa baik lokal maupun nasional banyak berperan dalam mengangkat berita tentang konflik yang terjadi di berbagai tempat. Bahkan berita-berita tersebut diulas dengan pandangan para ahli dari berbagai latar belakang. Melalui media massa, publik diajak untuk mengamati konflik yang sedang terjadi atau yang telah berlalu. Dari sisi masyarakat pembaca, media

massa adalah sumber informasi utama untuk mengetahui peristiwa yang terjadi di dalam interaksi sosial.

Pada sisi lain, kebanyakan liputan media massa, yang dijadikan rujukan untuk mengetahui konflik yang terjadi, sarat dengan pesan-pesan tersembunyi di balik fakta hubungan-konflik yang menjadi fokus berita (Hamad, 2004; Riyadi, 2003) sehingga gambaran tentang konflik semakin meluas dan kompleks. Para akademisi memang telah yang mencoba menganalisis secara sistematis tentang peristiwa konflik di satu daerah. Akan tetapi kajian ini terbatas penyebarannya, dan beragam sudut pandangnya.

Untuk tujuan pendidikan kajian-kajian tersebut masih perlu ditelusuri lebih jauh. Perlu dipisahkan antara fakta yang sesungguhnya dengan "orientasi" yang digunakan untuk menyampaikan fakta tersebut. Dengan demikian, pembaca sebagai penerima informasi paham apa yang terjadi di tengah masyarakatnya dan apa hubungannya dengan konteks sosial yang lebih luas. Selain itu, keragaman gambaran tentang hubungan-konflik antar etnik perlu ditemukan sintesisnya sehingga dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam merumuskan pendidikan multikultural. Dari sinilah (salah satunya) dapat dikembangkan landasan-landasan dasar pendidikan multikultural.

Ada tiga alasan utama mengapa media massa menjadi perhatian dalam konteks pengembangan pendidikan multikultural dalam penelitian ini. Pertama, media massa (jurnalisme) adalah sistem yang dilahirkan masyarakat untuk memasok berita (Kovach & Rosenstiel, 2001; 2). Dalam kehidupan, orang memiliki atribut yang disebut "naluri kesadaran" yakni menghendaki adanya pertukaran informasi dengan dunia di luar diri sehingga hidup dirasakan tidak

terisolasi. Dalam masyarakat multikultural peranan media massa mendapat nilai lebih sebagai "ruang publik" yang menjembatani keragaman (www.wikipedia.com /2005). Untuk itu dibutuhkan informasi yang tidak bias, serta memenuhi kaidah kejujuran dalam pemberitaan.

Kedua, bahasa (tulisan) merupakan alat penyajian berita. Dalam pandangan filsafat bahasa pemikiran tentang bahasa terkait dengan kategori utama dalam filsafat pengetahuan, kebenaran, makna, dan akal budi. Oleh karena itu, perhatian utama bagi pemerhati bahasa atau segala sesuatu yang terkait dengan penggunaan bahasa adalah apa hubungan antara pernyataan (*statement*) dengan keadaan (*state of affairs*) yang dideskripsikan (Cavallaro 2004: 10).

Ketiga, media massa memiliki kebijakan redaksional, yang kadang-kadang menjadikan media massa tidak berpihak kepada kebutuhan masyarakat banyak. Dalam bahasa Chomsky (1997) disebut dengan hegemoni. Keberpihakan media massa kepada kepentingan diri sendiri ini menjadikan informasi dari media massa "terbiaskan" sehingga bagi pembaca awam sulit membedakan mana fakta, mana kepentingan (orientasi atau ideologi) yang melatarbelakangi penyusunan fakta dalam bentuk berita.

Dari tiga fenomena tersebut, disimpulkan bahwa media massa adalah sarana yang dibutuhkan masyarakat sebagai sumber informasi. Akan tetapi, dengan kelemahan yang dimiliki media massa, diperlukan kajian khusus untuk memahami berita yang disajikan. Dalam pandangan pengkaji budaya (*cultural studies*), kajian khusus itu disebut pendekatan kritis (Cavallaro, 2004) yang membimbing pembaca (bahasa tulisan) mampu menangkap makna di balik sajian

bahasa. Mampu mengambil informasi tentang suatu peristiwa, setelah dipisahkan dari orientasi yang mempengaruhi pemberitaan peristiwa tersebut

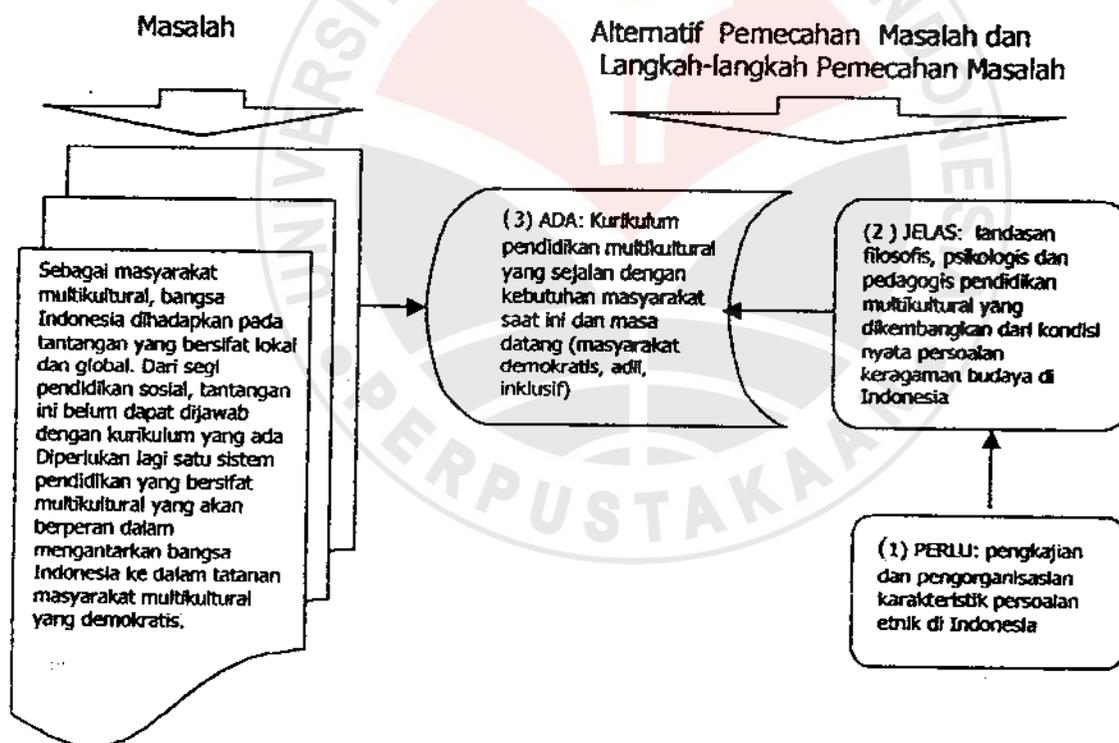
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yakni sebagai berikut.

1. Konflik etnik di berbagai tempat baik horizontal maupun vertikal akhir-akhir ini terlihat meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Keadaan ini merupakan indikator bahwa persoalan etnik di Indonesia memerlukan upaya penanganan jangka panjang, di samping jangka pendek. Di lain pihak kurikulum pendidikan formal khususnya PIPS belum menampung kebutuhan pencegahan konflik yang berjangka panjang.
2. Persoalan antar etnik dan pendidikan multikultural antara satu negara bangsa dengan negara bangsa lainnya, berbeda dari segi karakteristiknya. Di Indonesia sudah banyak kajian yang dilakukan untuk melihat persoalan antar etnik, namun belum banyak perhatian dicurahkan untuk merumuskan hasil-hasil kajian tersebut menjadi sebuah kerangka teoritis yang definitif untuk dijadikan landasan pengembangan pendidikan.
3. Di sekolah memang sudah ada kurikulum PIPS khususnya Sosiologi/ Antropologi, di samping muatan lokal yang mengangkat isu multikultural. Akan tetapi, pembahasannya terbatas pada "*soft multiculturalism*" (multikultural yang dangkal), dan belum diarahkan kepada pembentukan kesadaran multikultural di kalangan siswa untuk mencapai masyarakat multikultural yang demokratis.

Jika permasalahan-permasalahan di atas dicermati dengan sudut pandang pendidikan, maka inti persoalannya terletak dalam satu masalah utama yaitu: belum adanya pendidikan multikultural yang memenuhi harapan sebagai sarana pencegahan konflik antar kelompok etnik yang bersifat jangka panjang. Untuk mengembangkan pendidikan multikultural tersebut, perlu kejelasan tentang landasan filosofis, psikologis, dan pedagogis yang didasarkan pada kejelasan konsep mengenai persoalan antar etnik yang ada. Penelitian ini pada dasarnya bertolak dari alasan-alasan tersebut. Bagaimana permasalahan ini diangkat menjadi topik penelitian, dapat digambarkan melalui bagan berikut.

Gambar 1.2 Ringkasan Identifikasi Masalah dan Alternatif Pemecahan Masalah



Oleh karena begitu luasnya permasalahan yang ada, maka penelitian ini akan lebih berkonsentrasi pada langkah-langkah pemecahan masalah tahap pertama (1), yang ditindak lanjuti dengan pengembangan kerangka konseptual sebagai landasan pemecahan masalah pada tahap kedua (2). Alasan utama dengan konsentrasi pada pemecahan masalah pertama (1) adalah karena tahap ini memerlukan penggalian dan pengkajian informasi secara mendalam untuk mengidentifikasi kekhasan persoalan etnik di Indonesia. Hasil kajian ini akan dikonfirmasi dan dikomparasi dengan pemikiran teoritis yang ada, sehingga dapat dikembangkan suatu rekomendasi konseptual yang dapat dijadikan dasar pendidikan multikultural yang sebaiknya dikembangkan di Indonesia. Rekomendasi ini merupakan langkah awal pemecahan masalah tahap kedua seperti dimaksud dalam gambar di atas. Dikatakan demikian, karena rekomendasi ini perlu dikembangkan lagi melalui serangkaian uji coba dan kajian lanjut sehingga menjadi sebuah landasan pendidikan multikultural yang lebih sistematis.

Adapun objek kajian yang digunakan dalam penelitian adalah berita tentang konflik yang dimuat dalam media massa dan tulisan para pengamat (peneliti, praktisi, dan LSM) yang membahas tentang konflik yang terjadi di daerah. Agar pembahasan lebih terarah, daerah konflik serta media massa yang menjadi perhatian penelitian ini perlu dibatasi. Daerah konflik tersebut meliputi tiga kasus yaitu, konflik Ambon mencakup Maluku, konflik Sambas dan Sampit, dan konflik Poso. Demikian juga, media massa yang diteliti dibatasi pada tiga media massa nasional yaitu, *Republika*, *Kompas*, dan *Media Indonesia*. Secara lengkap alasan-alasan pembatasan ini dibahas dalam bab III.

Melalui laporan para wartawan, media massa telah mendokumentasikan dan mempublikasikan secara konsisten berbagai peristiwa konflik di berbagai tempat, dan bahkan diulas dengan berbagai pendapat pengamat. Bagi sebagian besar masyarakat yang berada di luar wilayah konflik laporan-laporan dan tulisan media massa merupakan sumber informasi utama untuk mengetahui suatu peristiwa. Karena itu dari sudut pandang pendidikan media massa merupakan salah satu dari sumber belajar yang menyajikan berbagai peristiwa.

Akan tetapi di sisi lain, media massa adalah organisasi yang terkait dengan kepentingan pemilik dan tujuan yang ingin dicapai oleh media massa. Dengan kata lain laporan media massa sarat dengan ideologi dan kepentingan-kepentingan khusus yang tidak terlihat secara langsung oleh khalayak pembaca. Sebagaimana dikatakan oleh Giddens dkk (2004) yang dirujuknya dari pendapat McLuhan, bahwa media massa mempengaruhi masyarakat terletak lebih pada cara berkomunikasi (*how they communicate*) dibanding pada apa yang dikomunikasikan (*what they communicate*). Cara berkomunikasi media tersebut banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga materi pemberitaan yang sama oleh dua media yang berbeda dapat disajikan secara berbeda. Oleh karena itu, diperlukan satu metode khusus untuk mengetahui pesan tersembunyi itu dan memisahkan dari fakta. Satu di antara metode itu adalah Analisis Kritis terhadap Wacana atau *Critical Discourse Analysis* yang sering disingkat dengan CDA (Fairclough, 1992, 1995; Van Dijk, 1985a, 1985b).

Dalam proses penelitian ini, permasalahan tersebut dikembangkan dalam bentuk pertanyaan umum sebagai berikut:



1. Bagaimana penggambaran konflik menurut media massa? Bagaimana karakteristik hubungan-konflik antar etnik di tiap daerah konflik? Bagaimana perbedaan dan persamaan karakteristik persoalan etnik di tiap-tiap daerah konflik?
2. Bagaimana pola hubungan-konflik antar etnik secara umum berdasarkan kasus pada ketiga daerah konflik yang diteliti? Bagaimana peran media massa dalam masyarakat multikultural Indonesia dan perannya dalam pemberitaan konflik?
3. Bagaimana bentuk rumusan kerangka konseptual yang memuat landasan filosofis, psikologis, dan pedagogis pendidikan multikultural di Indonesia berdasarkan generalisasi yang dapat ditarik dari daerah-daerah konflik yang dikaji dalam penelitian ini?

Untuk memudahkan pengumpulan dan analisis data, pertanyaan-pertanyaan itu dikelompokkan menjadi: pertanyaan ke 1 dikhususkan pada Analisis Kritis terhadap Wacana (CDA) dengan objek kajiannya media massa. Pertanyaan ke 2, di telusuri dengan kajian komparasi antara hasil (data) dari analisis media massa (jawaban terhadap pertanyaan ke 1), dengan pandangan pengamat (peneliti, praktisi, dan LSM) tentang masalah etnik di Indonesia, serta kajian kepustakaan mengenai konflik. Terakhir, pertanyaan ke 3 khusus mengenai PIPS yang dijawab dengan bertolak dari data 1 dan 2 serta kajian kepustakaan.

Sejalan dengan kelompok pertanyaan tersebut maka penelitian ini dibagi ke dalam tiga tahap sebagai berikut.

A. Tahap satu kajian CDA. Untuk memudahkan pengumpulan dan analisis informasi, maka kajian dengan CDA dikembangkan dengan pertanyaan pemandu sebagai berikut.

- Bagaimana tema tentang konflik distruktur dalam teks?
 - Pemilihan kata untuk mendukung tema
 - Referensi yang digunakan
 - Penggunaan kalimat yang mendukung tema.
- Bagaimana tema dalam teks dapat dimaknai dari segi "ideasional", "interpersonal, dan "tekstual"?
- Bagaimana arah berita diekspresikan dalam kalimat, apakah tertuju kepada pelaku, atau sebab akibat, atau tanggung jawab, atau gabungan?
- Bagaimana posisi media massa dalam konteks sosial (pro-kontra kenyataan sosial (power) yang ada? Apakah mempertajam perbedaan atau mengaburkan perbedaan? Apakah menyuarakan kepentingan masyarakat atau kepentingan pihak tertentu? Bagaimana perbandingan antar media massa dalam menempatkan diri pada realitas sosial?
- Bagaimana proposisi-proposisi dibangun dalam teks untuk menyampaikan berita?

Jawaban dari semua pertanyaan itu dirangkum dalam dua kelompok kesimpulan yaitu, 1) isu konflik etnik yang menjadi fokus perhatian media massa, dan 2) orientasi pemberitaan yang (ideologi) melatarbelakangi cara media massa memberitakan konflik.

B. Tahap kajian komparasi dan kepustakaan. Pada tahap ini dikembangkan kajian lanjut dengan cara studi kepustakaan terhadap tulisan para pengamat (peneliti, praktisi, dan LSM), serta literatur mengenai konflik sebagai bahan komparasi terhadap data tahap satu. Pertanyaan pemandu dalam tahap dua ini adalah sebagai berikut.

- Bagaimana bentuk rumusan teoritis yang menggambarkan karakteristik persoalan konflik etnik secara umum di Indonesia dengan berpatokan pada kasus di ketiga daerah konflik, dan secara khusus pada tiap-tiap daerah tersebut?
- Bagaimana peran media massa dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia, dan dalam pemberitaan konflik?

C. Tahap perumusan rekomendasi. Lebih jauh jawaban pertanyaan tahap kedua di atas merupakan panduan tahap ketiga penelitian yang difokuskan pada perumusan rekomendasi kerangka konseptual pendidikan multikultural dalam PIPS.

Untuk tahap ini dikembangkan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan sebagai patokan sebagai berikut.

- Bagaimana rumusan landasan filosofis pendidikan multikultural yang sesuai dengan persoalan etnik sebagaimana tergambar pada ketiga daerah konflik?
- Bagaimana rumusan landasan psikologis pendidikan multikultural yang sejalan dengan karakteristik persoalan etnik yang ditemukan pada ketiga daerah konflik tersebut?

- u Bagaimana rumusan landasan pedagogis pendidikan multikultural yang sesuai dengan karakteristik persoalan etnik yang ditemukan pada ketiga daerah konflik tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Menggali, mengkaji, dan mengorganisasikan informasi secara kritis mengenai berita konflik dari media massa dan mengkomparasikan dengan pandangan para pengamat tentang persoalan etnik di tiga daerah konflik, sehingga informasi tersebut dapat dikristalisasikan menjadi suatu kerangka konseptual tentang karakteristik persoalan etnik yang dapat dikembangkan menjadi landasan pendidikan multikultural di sekolah
2. Menggali, mengkaji dan mengorganisasikan informasi teoritik dan empirik mengenai pendidikan multikultural yang sejalan dengan kerangka karakteristik persoalan etnik sebagaimana ditemukan pada ketiga daerah konflik
3. Mengembangkan rekomendasi kerangka konseptual pendidikan multikultural yang memuat landasan filosofis, psikologis, dan pedagogis.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan langkah pengembangan teori hubungan-konflik antar etnik di Indonesia, yang khususnya didasarkan pada kajian kritis terhadap tulisan media massa dan para pengamat. Dari langkah ini

diharapkan muncul tradisi hermeneutika yang berguna untuk pengembangan Pendidikan IPS (Pendidikan Multikultural).

Dari penelitian ini dikembangkan sebuah rekomendasi berupa kerangka konseptual pendidikan multikultural yang sesuai dengan persoalan etnik di Indonesia sebagaimana terlihat pada ketiga daerah konflik yang diteliti. Kerangka konseptual tersebut bermanfaat sebagai rujukan (awal) dalam penyusunan program-program pendidikan yang bersifat multikultural di sekolah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan merupakan jembatan antara kajian kritis dalam ilmu sosial khususnya yang berkaitan dengan peran media massa dalam masyarakat multikultural di satu pihak, dan pengembangan pendidikan sosial di pihak lain.

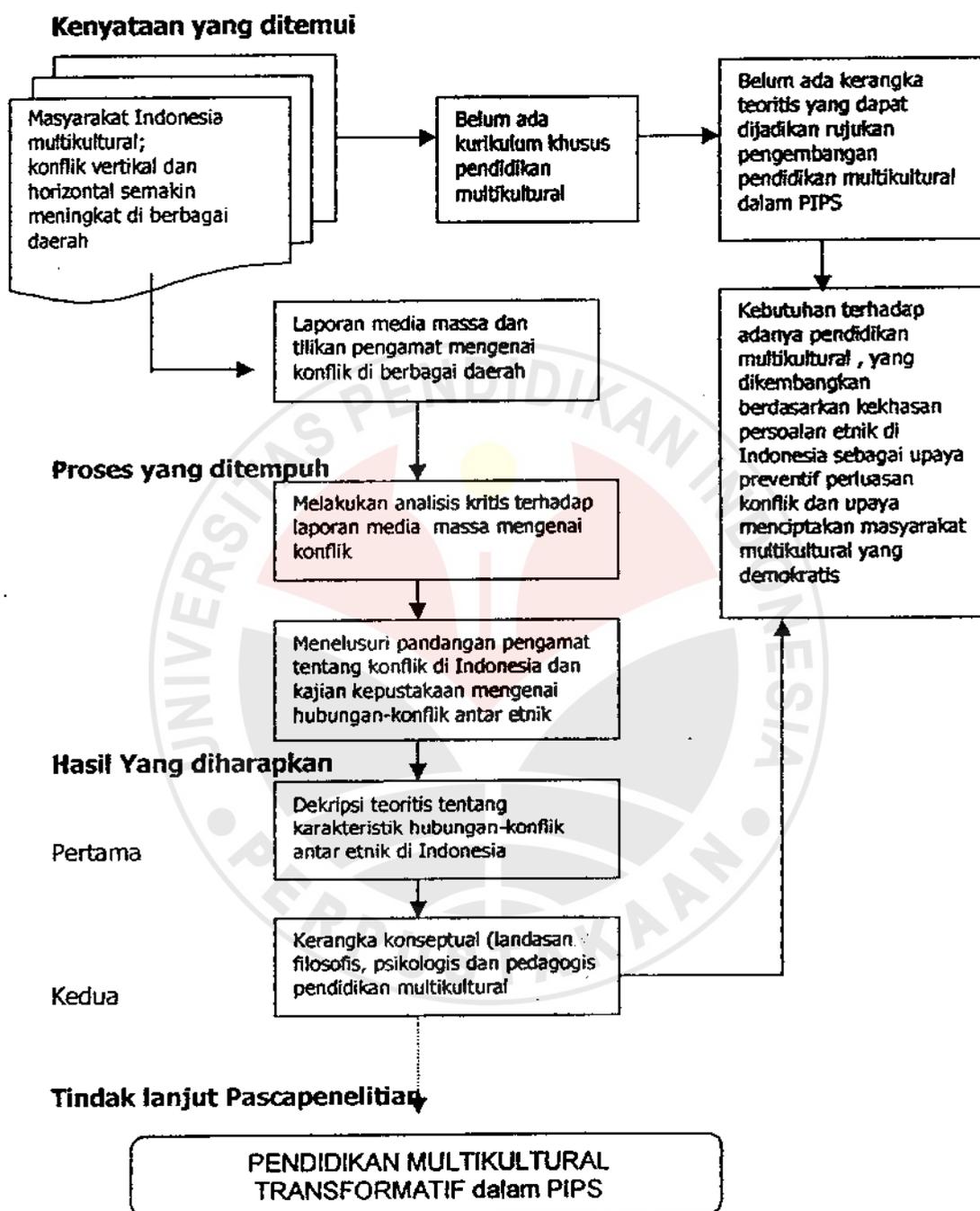
Secara praktis proses penemuan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dijadikan model penggalian informasi secara kritis mengenai persoalan-persoalan etnik yang dapat diterapkan dalam lingkup yang kecil seperti di tingkat kelas. Selain itu informasi empirik yang diperoleh dari kajian kritis terhadap berita media massa dapat menjadi umpan balik bagi media massa dalam menyajikan berita konflik secara proporsional, dan memperhatikan kepentingan bangsa dan negara.

1.5 Kerangka Berfikir dalam Penelitian

Secara ringkas alur berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam skema berikut.

Gambar 1.3

KERANGKA BERFIKIR PENELITIAN





1.6 Klarifikasi Konsep

Di dalam judul disertasi ini terdapat beberapa konsep yang perlu penjelasan yaitu : Kerangka Konseptual Pendidikan Multikultural Transformatif, Pola Hubungan-Konflik antar Etnik, dan Kajian Kritis.

1.6.1 Kerangka Konseptual Pendidikan Multikultural Transformatif

Istilah kerangka konseptual digunakan dalam disertasi ini untuk menunjukkan landasan pemikiran filosofis, psikologis dan pedagogis mengenai pendidikan multikultural di sekolah. Dalam kerangka ini tercakup rasional yang menjelaskan tentang perlunya pendidikan multikultural, perspektif pendidikan multikultural, pandangan pendidikan tentang belajar dan pendekatan dalam pendidikan multikultural. Sebagai panduan berfikir dalam pengembangan kerangka ini digunakan empat pertanyaan pengarah yakni, *Where are we headed? What are we becoming? Why do we exist? How do we get there?* (Rosado, 1996).

Disebut dengan kerangka konseptual karena rumusan ini hanya berupa rekomendasi yang dikembangkan secara hipotetik berdasarkan karakteristik keragaman etnik di tiga daerah konflik yang dianalisis melalui media massa. Selain itu kerangka ini bersifat garis besar yang masih perlu dikembangkan lagi dengan penelitian lanjut berupa pengkajian secara mendalam pemikiran-pemikiran filosofis, psikologis dan pedagogis yang dirujuk dalam kerangka ini, serta uji coba yang sistematis dan terprogram.

Kemudian istilah multikultural yang digunakan dalam disertasi ini didasarkan kepada pengertian multikultural sebagaimana didefinisikan oleh

Kymlicka (2002: 27) yakni keragaman masyarakat yang disebabkan perbedaan etnik dan keragaman budaya antar etnik. Tidak termasuk dalam definisi ini keragaman sebagaimana yang diperjuangkan oleh gerakan sosial misalnya gerakan kelompok gay/lesbi, feminisme yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam hal ini peneliti sependapat dengan Kymlicka yang menyatakan bahwa isu kemajemukan yang dibawa kelompok tersebut bukan dianggap tidak penting, tetapi masih merupakan kecenderungan. Karena itu dengan mengakomodasi perbedaan yang didasarkan pada keragaman etnik dan bangsa merupakan bagian dari perjuangan yang lebih besar untuk membuat masyarakat demokratis yang lebih toleran dan inklusif. Sedangkan, istilah transformatif yang digunakan untuk menyebut pendidikan yang direkomendasikan dalam disertasi adalah menunjukkan kekhasan pendidikan tersebut yang menggunakan pendekatan kritis dan transformatif.

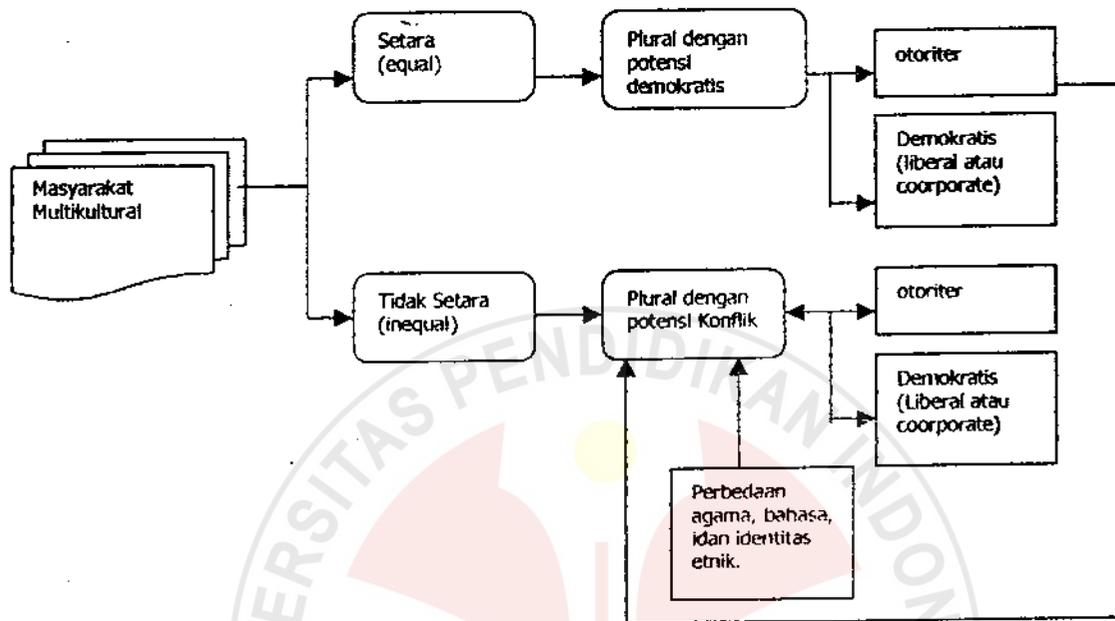
1.6.2 Pola Hubungan-Konflik Antar Etnik

Hubungan-konflik yang dimaksud dalam disertasi ini adalah bentuk interaksi masyarakat multikultural di Indonesia. Berdasarkan kajian teori yang dipaparkan dalam Bab 2, ada dua kelompok besar interaksi yang dijadikan patokan penelitian ini: setara (*equal*) dan tidak setara (*inequal*).

Interaksi setara menghasilkan bentuk masyarakat plural yang berpotensi membentuk tatanan demokratis. Sedangkan interaksi tidak setara menghasilkan masyarakat plural yang berpotensi konflik. Kemungkinan potensi konflik berasal dari perbedaan agama, bahasa, dan identitas etnik.

Adapun bentuk kebijakan masyarakat yang mungkin terjadi pada kedua bentuk masyarakat tersebut adalah otoriter dan demokratis. Pola hubungan-konflik ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.4 Kerangka Hipotetik Masyarakat Multikultural



1.6.3 Kajian Kritis

Kajian kritis yang dimaksud dalam disertasi ini adalah Analisis Wacana Secara Kritis atau *Critical Discourse Analysis* (Fairclough, 1992, 1995; VanDijk, 1985a, 1985b, 1998) yang merupakan metode pengumpulan data, khususnya data dari media massa. Metode ini menggunakan interpretasi yang bersifat abstrak dan konkrit (Van Dijk 1985). Abstrak artinya penafsiran dengan sistem dan aturan sistem dalam wacana, sedangkan konkrit penafsiran dari sudut pandang pengguna bahasa dengan menggunakan sistem kerja seperti dalam psikologi kognitif yang dimulai dari pemahaman tentatif, kemudian

dikembangkan dengan menggunakan informasi dari teks itu sendiri dan dari konteks secara bersamaan.

Dari hasil kajian ini diharapkan diperoleh temuan mengenai orientasi yang digunakan media massa dalam pemberitaan tentang konflik, dan karakteristik hubungan-konflik antar etnik seperti yang dimaksud pada point 1.6.2 di atas. Selanjutnya dijadikan landasan pengembangan rekomendasi kerangka filosofis, psikologis, dan pedagogis pendidikan multikultural di sekolah.

